



**PEMERINTAH  
KABUPATEN JOMBANG**

# **RENJA RENCANA KERJA**

## **TAHUN 2024**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JOMBANG**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024, ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Renja PD ) ini disusun sebagai upaya mengarahkan semua unsur kekuatan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk mencapai tujuan dan sasaran tahunan yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra). Penyusunan Renja PD ini dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga sebagai pedoman dalam evaluasi pelaksanaan kinerja PD (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Diharapkan dokumen ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh karyawan/karyawati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Stake Holder terkait di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan pelayanan perizinan sesuai visi dan misi yang telah disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pelayanan perizinan bersifat sinergis, koordinatif dan dapat saling melengkapi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang demi terwujudnya sebuah Pelayanan Perizinan yang Prima .

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Semoga mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik –

baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jombang, 12 Juli 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JOMBANG**



**Dra. WOR WINDARI, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19731204 199202 2 001**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.....</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>49</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	54
3.3 Program dan Kegiatan .....	55
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>69</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 (TBII) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang .....	16
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.....	27
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 .....	33
Tabel 2.4	Usulan dan Program Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	43
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang .....	61
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024 .....	69



# Bab 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang merupakan gabungan antara SKPD Badan Pelayanan Perizinan dengan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang. Dalam penyusunan Renja tahun 2024 ini berpedoman pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024-2026, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan

musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja SKPD.

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
4. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Mengengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang tahun 2021-2041;
  18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
  19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
  20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
  21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk :

- a. Untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- b. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
- c. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPD dengan Renja SKPD.
- d. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun dalam urusan perizinan, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jombang.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Agar dapat ditetapkannya tahapan-tahapan kebijakan demi tercapainya pelayanan kepada para investor yang akan menanamkan investasinya selain itu juga untuk mewujudkan program-program yang telah dituangkan dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
2. Memberikan gambaran arah kebijakan dibidang pelayanan investasi yang ada di Kabupaten Jombang sehingga dapat didukung oleh kebijakan sektor lainnya mengingat masalah pelayanan bersifat lintas sektoral dan wilayah;
3. Memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan dibidang perizinan;
4. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;

5. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
6. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

## HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

# Bab 2

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 berpedoman pada sasaran pokok pembangunan jangka panjang (2005-2025) yang menetapkan Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur. Mengingat bahwa Tujuan dan Sasaran RPD harus selaras dengan RPJPD, maka Sasaran 5 (tahunan) RPJPD Kabupaten Jombang tahun 2005 – 2025 adalah Visi RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 adalah

***“Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025”***

Selanjutnya dijabarkan ke dalam empat misi antara lain;

1. Mengembangkan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian dan produk unggulan daerah;
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur.

Berdasarkan telaah atas Visi dan Misi dokumen RPJPD Kabupaten Jombang di atas, Tujuan pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 sebagai berikut:

*Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdayasaing;
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya;
4. Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya.

Berdasarkan tujuan RPD di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada tujuan RPD ke 1 dan 4.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2024-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang ini menyajikan dasar pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang selama tahun 2023.

Berikut analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD atas capaian kinerja serta indikator kinerja yang termuat dalam dalam RPJMD Kabupaten Jombang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023, maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2022 untuk sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investasi dengan indikator kinerja Nilai Investasi Tahun n, target tahun 2022 sebesar Rp 1,8 T dan dapat terealisasi sebesar Rp 2.353.636.647.045,-. Dari nilai realisasi

*Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

investasi daerah tersebut, melebihi target sehingga capaian kinerja sebesar 130,76% dengan kategori capaian kinerja Istimewa.

Pada tahun 2021 target nilai realisasi investasi daerah sebesar Rp 1,250 T,- Terealisasi sebesar Rp 1.587.162.318.948,-. Dari nilai investasi daerah tersebut, sehingga capaian kinerjanya tercapai sebesar 126,97%, dengan kategori Istimewa.

Berdasarkan keterangan di atas untuk perkembangan nilai investasi untuk tahun 2022 naik sebesar 3,79% dibandingkan tahun 2021.

- Target akhir periode RPJMD /Renstra tahun 2018-2023 sebesar Rp. 1.400.000.000.000,- . Apabila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD / Renstra sudah terpenuhi dengan capaian kinerja sebesar 168,07%. Capaian kinerja pada tahun 2022 masuk dalam kategori *Istimewa*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk Nilai Investasi Daerah (PMA/PMDN) mengalami fluktuatif dikarenakan kondisi perekonomian pada umumnya.
- Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perizinan pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 87,75. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dapat terealisasi sebesar 85,11 yang diperoleh dari survey kepuasan masyarakat (SKM) sebanyak 397 responden/pemohon yang sudah terlayani. Sehingga untuk capaian kinerjanya tercapai sebesar 96,99 %, dengan kategori Baik. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 5,32% dari capaian tahun 2021. Sedangkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 4,10. Nilai IPP ini dapat terealisasi sebesar 4,61 dengan kategori pelayanan prima. Sehingga untuk capaian kinerjanya tercapai sebesar 112,44 %, dengan kategori Baik. Capaian ini mengalami peningkat sebesar 24,48% dari capaian tahun 2021.
- Target akhir periode RPJMD /Renstra 2018-2023 sebesar 89,85. Sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 ini dengan tingkat kemajuan sebesar 94.72%, atau belum memenuhi target akhir RPJMD/Renstra Tahun 2018-2023. Sehingga capaian kinerja masuk dalam kategori Baik.
- Target akhir periode RPJMD /Renstra 2018-2023 sebesar 4,15. Sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 ini dengan tingkat kemajuan sebesar 98,79%, atau belum memenuhi target akhir RPJMD/Renstra Tahun 2018-2023. Sehingga capaian kinerja masuk dalam kategori Baik.

Adapun beberapa pencapaian program/kegiatan pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- Pada tahun 2022 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target kinerja Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan sebanyak 1 kebijakan, dapat terealisasi 1 kebijakan dengan capaian 100%. Dibandingkan dengan tahun 2021 presentase capaian kinerja dengan target sebanyak 1 kebijakan, juga terealisasi 1 kebijakan (peta potensi peluang investasi daerah Kabupaten Jombang) dengan capaian 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan setiap tahunnya dapat mempertahankan capaian kinerjanya 100% dengan kategori Baik dan mencapai target yang ditentukan yaitu dokumen RUPM ditahun 2021 dan dokumen peta potensi peluang investasi di tahun 2022.
- Pada tahun 2022 Promosi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal 100%, dapat terealisasi 100%. Dibandingkan dengan tahun 2021 target kinerja dengan target 100%, dengan capaian 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal bisa mencapai indikator kinerjanya dengan target yang ditentukan yaitu 23 calon investor yang mengisi form kepeminatan sudah ditindak lanjuti 23 di tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 juga telah dilaksanakan tindak lanjut dari 20 peserta bisnis gathering yang mengisi form kepeminatan. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2021-2022 tercapai 100 % dengan kategori Baik.
- Pada tahun 2022 Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan dengan target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal sebesar 75% dapat terealisasi 123,53% dengan capaian 164,71%. Dibandingkan dengan tahun 2021 target kinerja dengan target 70%, realisasi kinerja 70% sehingga capaian kinerjanya 100%. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal bisa mencapai indikator kinerjanya dengan target yang ditentukan yaitu dari target 80 perusahaan yang patuh lapor LKPM, pada 2021 tercapai 80 perusahaan patuh lapor LKPM. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 105 perusahaan yang telah melaporkan LKPM dari total target 85 perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan

*Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Penanaman Modal dari tahun 2021 dengan capaian 100% dan 2022 dengan capaian 164,71% mengalami kenaikan dengan predikat istimewa.

- Pada tahun 2022 Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan sebesar 80% dapat terealisasi 90,94% sehingga capaian kinerja sebesar 113,67%. Sedangkan pada tahun 2021 Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan sebesar 78% dapat terealisasi 79,45% sehingga capaian kinerja sebesar 101,9%. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan bisa mencapai indikator kinerjanya dengan target yang ditentukan pada 2021 yaitu dari total izin terbit (berusaha dan non berusaha) sejumlah 7.104 izin, yang terbit tepat waktu adalah 5.644 izin. Pada tahun 2022 dari jumlah izin yang terbit sejumlah 12.957 izin, 11.783 izin terbit sesuai standart pelayanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan dari tahun 2021 dengan capaian 101,9% dan 2022 dengan capaian 113,67% mengalami kenaikan dengan predikat istimewa.
- Pada tahun 2022 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan 23% dapat terealisasi 27% sehingga tercapai sebesar 116%. Sedangkan tahun 2021 Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan 22% dapat terealisasi 80% sehingga cpaianya sebesar 363,6%. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan target kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan Pada tahun 2022 jumlah pengguna yang puas adalah 5.541 pengguna sedangkan Pada tahun 2021, pengguna sistem informasi sejumlah 5.465 pengguna (478 sirindunona + 4.987 web perizinan), dan dari jumlah tersebut sebesar 4.372 pengguna sistem puas dengan pelayanan perizinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari 2021 mengalami penurunan dikarenakan angka di 2021 digunakan sebagai base data, dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru sesuai review Sakip Inspektorat.
- Pada tahun 2022 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur 100% dapat terealisasi 100% sehingga tercapai sebesar 100%. Pada

*Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

tahun 2021 target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur 100% dapat terealisasi 100% sehingga tercapai sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2021 tercapai 100% dengan kategori baik.

- Untuk PAD pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang target PAD tahun 2022 sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan realisasi PAD sebesar Rp. 1.391.454.364,- (139.15%). Untuk PAD Tahun 2021 sebesar Rp. 2.097.848.309,- dengan realisasi PAD sebesar Rp 1.802.683.619, - (85.93%)- . Sedangkan di tahun 2020 target PAD sebesar Rp 1.753.549.464,- dengan realisasi PAD sebesar Rp. 3.217.338.669,- (183.47 %).

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, antara lain sebagai berikut :

1. Masalah jaminan kenyamanan dalam berinvestasi, hambatan ini lebih disebabkan oleh karena tidak terlaksananya secara maksimal SOP dalam proses pelayanan penanaman modal dan sumber daya untuk pelayanan penanaman modal yang kurang memadai baik berupa sarana/prasarana dan SDM penanaman modal.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan secara online.
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan dan kebijakan penanaman modal.
4. Masih kurangnya penanam modal atau investor yang menjalin kemitraan dengan pelaku usaha kecil menengah (UKM), ini disebabkan karena sebagian besar produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UKM masih belum sejalan dengan kebutuhan investor yang ada pada daerah.
5. Sistem regulasi yang mengatur tentang kebijakan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang kurang menarik sehingga menyebabkan minat untuk berinvestasi semakin berkurang
6. Pertumbuhan investasi yang telah dicapai belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja.
7. Adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan investasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
8. Waktu penerbitan rekomendasi dari OPD Teknis yang masih belum maksimal/sesuai SOP

Solusi dari permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Diperlukannya penyampaian fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih antar SKPD teknis dalam rangka mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- b. Mengoptimalkan pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan LKPM
- c. Mengintensifkan fungsi koordinasi dan konsultasi di Internal Organisasi maupun SKPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perizinan menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
- d. Pengembangan system teknologi informasi pelayanan perijinan secara komprehensif dan berkelanjutan (data base).
- e. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan. Sehingga memberikan kenyamanan kepada pemohon/pengguna jasa secara bertahap, maupun sarana penunjang lainnya.
- f. Perlunya pendampingan pada pelaku usaha/pemohon izin dalam pengajuan proses perizinan secara online (OSS dan Sirindunona).

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pencapaian target yaitu:

- a. Meningkatkan kegiatan promosi/sosialisasi mengenai Potensi daerah di Kabupaten Jombang
- b. Pendampingan permasalahan perusahaan dan bimtek penyusunan LKPM
- c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai Perizinan
- d. Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan perizinan
- e. Peningkatan pelayanan perizinan melalui IT secara online (kemudahan Pelayanan Perizinan OSS dan Sirindunona)
- f. Penanganan Pengaduan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun media lainnya
- g. Penyempurnaan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan
- h. Penerapan SMM ISO 9001 : 2008
- i. Implementasi SI RINDU NONA dapat meningkatkan target indikator perizinan masuk dan terbit khususnya perizinan non berusaha dimana pemohon dapat mengajukan izin bidang kesehatan, penelitian dan reklame dari rumah tanpa harus datang ke kantor.

*Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Program dalam Renstra yang dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja Perangkat Daerah untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya :

- Peningkatan jumlah pelaporan LKPM online
- Adanya koordinasi yg baik dengan dinas terkait sehingga mempermudah dalam pengumpulan data potensi investasi yang akan digunakan bahan penyusunan peta potensi peluang investasi daerah Kabupaten Jombang
- Sudah tersedianya project prospectus
- Dengan melaksanakan promosi melalui pameran investasi dan web
- Pelaksanaan program BULAGA dapat meningkatkan target indikator perizinan masuk dan terbit khususnya perizinan berusaha
- Implementasi SI RINDU NONA dapat meningkatkan target indikator perizinan masuk dan terbit khususnya perizinan non berusaha
- Sudah diterapkannya pelayanan perizinan non berusaha secara online, melalui aplikasi Sirindunona, dimana pemohon dapat mengajukan izin bidang kesehatan, penelitian dan reklame dari rumah tanpa harus datang ke kantor
- DPMPTSP Kab. Jombang yang merupakan salah satu dari pelayanan publik yang berperan aktif dalam mendapatkan penghargaan dari ombudsman RI dengan predikat kepatuhan tinggi

Kebijakan – kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

- Pendampingan pengajuan izin berusaha
- Pelayanan izin non berusaha
- Pemenuhan komitmen perizinan berusaha
- Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Perizinan (SOP,SPP,SPM,IKM dan ISO)
- Upgrade dan update data informasi perizinan dan penanaman modal
- Monitoring evaluasi pengendalian dan pengawasan penanaman modal dan perizinan
- Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan perizinan dan Penanaman Modal
- Temu Usaha (Bisnis Gathering)
- Promosi Potensi Investasi Daerah

*Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

- Bimtek LKPM online dan pendampingan LKPM
- Penyusunan Dokumen Perencanaan kebijakan dan Pengembangan Penanaman Modal
- Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Pengadaan sarana dan prasarana, Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana prasarana, gedung kantor dan kendaraan dinas/kendaraan operasional
- Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
- Konsistensi penyusunan dokumen perencanaan, capaian kinerja dan keuangan SKPD sesuai dengan aturan

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 (TB II)**  
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2023) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN YANG SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN	78 %	79,45 %	80 %	90,94 %	113,68%	82 %	95,69 %	116,70%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan perizinan yang diterbitkan	85 %	93,08 %	87 %	91,23 %	104,86 %	89 %	77 %	88,51
		Persentase pengaduan masyarakat yg diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,0%	100 %	100 %	100%
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaksanaan bulaga	5 Kali	0 Kali	6 Kali	6 Kali	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah perizinan berusaha yang diterbitkan	3500 izin	4529 izin	7500 izin	10.060 izin	134,13%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah perizinan non berusaha yang diterbitkan	2000 izin	25759 izin	2600 izin	2897 izin	1111,42%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	600 Pelaku usaha	10.701 Pelaku usaha	178,35%
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang diterbitkan	85 %	94,84 %	87 %	67,53 %	79,45%	N/A	N/A	N/A

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2023) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	800 Kegiatan Usaha	292 Kegiatan Usaha	36,50%
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100,0%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16 orang	9 orang	56,25%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN	22 %	80 %	23 %	27 %	117,39	23 %	0 %	0
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan	2500 pengguna	5465 pengguna	3700 pengguna	5541 pengguna	149,76 %	4000 pengguna	4261 pengguna	106,53%
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah laporan perizinan dan penanaman modal	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Laporan		N/A	N/A	N/A

## Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2023) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Frekuensi pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan PM dan Perizinan	4 kali	0 Kali	4 Kali	Kali		N/A	N/A	N/A
		Jumlah Dokumen standar pelayanan perizinan	N/A	N/A	4 Dokumen	4 dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Ditinjau dan Dimanfaatkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8 dokumen	2 dokumen	25%
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	JUMLAH RUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN IKLIM PM YANG DIHASILKAN	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100,0%	1 Kebijakan	0 Kebijakan	0%
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Persentase Data Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,0%	100 %	50 %	50%
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Dokumen standar pelayanan perizinan	4 Dokumen	4 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan peluang investasi yang disusun	N/A N/A	N/A N/A	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Dokumen	0 Dokumen	0%

## Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2023) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE TINDAKLANJUT PROMOSI PENANAMAN MODAL	100 %	100 %	100 %	100 %	100,0%	100 %	0 %	0,0%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Calon investor yang berminat	100 %	100 %	100 %	100 %	100,0%	100 %	0 %	0,0%
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Potensi Unggulan Daerah yang diikuti	4 Kali	3 Kali	0 Kali	0 Kali	0	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pelaku usaha yg terfasilitasi promosi	80 pelaku usaha	0 pelaku usaha	0 pelaku usaha	0 pelaku usaha	0	N/A	N/A	N/A
		Jumlah peserta Temu Usaha yang berpotensi menjadi calon investor	50 orang	23 orang	20 orang	20 orang	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 dokumen	0 dokumen	0
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL	70 %	100 %	75 %	123,53 %	164,71%	75 %	47,06 %	62,75%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	80 Perusahaan	80 Perusahaan	85 Perusahaan	105 perusahaan	123,53 %	85 Perusahaan	40 Perusahaan	47,06%
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	80 Perusahaan	80 Perusahaan	85 Perusahaan	105 Perusahaan	123,53 %	N/A	N/A	N/A

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2023) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
		Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	30 obyek pengawasan	23 obyek pengawasan	15 obyek pengawasan	19 obyek pengawasan	126,67 %	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85 Kegiatan usaha	40 Kegiatan usaha	47,06%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pendampingan perusahaan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah peserta bimtek LKPM	150 orang	150 orang	140 orang	140 orang	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90 Pelaku usaha	20 Pelaku usaha	22,22%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal	20 laporan	20 laporan	16 laporan	16 laporan	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Bimtek / Sosialisasi Kemudahan Berusaha	8 kali	8 kali	480 orang	480 kali	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16 Kegiatan usaha	4 Kegiatan usaha	25%
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	100 %	100 %	100 %	100 %	100,0%	100 %	50 %	50,0%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai aturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,0%	100 %	50 %	50,0%

## Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2023) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.18.01.2.01.010	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100,0%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	12 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100,0%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15 Dokumen	7 Dokumen	46,67%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100,0%	100 %	50 %	50,0%
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,0%	100 %	50 %	50,0%
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup DPMPSTSP yang di fasilitasi	14 Bulan	12 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100,0%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	100%
2.18.01.2.02.07	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	N/A	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100,0 %	N/A	N/A	N/A
		Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD			N/A	N/A	N/A	4 dokumen	4 dokumen	50%

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2023) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	N/A	N/A	1 laporan	1 laporan	100,0%			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang tersusun	44 laporan	44 laporan	17 laporan	17 laporan	100,0%			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	N/A	N/A	100 %	100 %	100%			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi	N/A	N/A	35 pegawai	31 pegawai	88,57%			
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100,0%	100 %	50 %	50,0%
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	14 jenis	14 jenis	14 jenis	14 jenis	100,0%			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						11 paket	6 paket	54,55%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	73 jenis	73 jenis	70 jenis	70 jenis	100,0%			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						63 paket	35 paket	55,56%
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100,0%			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						10 paket	6 paket	60%

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2023) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	56 Pegawai	52 Pegawai	0 Pegawai	0 Pegawai	0			
		Jumlah Penyediaan BBM yang terfasilitasi	1934 liter	1934 liter	2000 liter	2000 liter	100,0%			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						3 paket	3 paket	100%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	7 jenis	7 jenis	10 jenis	10 jenis	100,0%			
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan	85352 lembar	85.352 lembar	85.352 lembar	85.352 lembar	100,0%			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						2 paket	2 paket	100%
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	3 jenis	3 jenis	12 jenis	12 jenis	100,0%			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						36 dokumen	18 dokumen	50%
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 kali	35 kali	40 kali	40 kali	100,0%			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						35 laporan	22 laporan	62,86%
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	1000%	100 %	73,91 %	73,91%

## Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2023) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	7 Unit	7 Unit	9 Unit	9 Unit	100,0%			
		Jumlah unit sarana gedung dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan						23 unit	17 Unit	73,91%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100,0%	100 %	66,6 %	66,67
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,0%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	6 laporan	50%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,0%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	6 Laporan	50%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	13 jenis	13 jenis	12 jenis	12 jenis	100,0%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						8 Laporan	8 laporan	100%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100,0%	100 %	50 %	50,0%
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,0%			
		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,0%			

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun n-2 (2022)	Realisasi Renja PD Tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (n-1) (2023) (s/d TB II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						1 unit	1 unit	100%
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	25 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100,0%			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	25 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100,0%			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						24 unit	12 unit	50%
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Perangkat Daerah yang dipelihara	2 gedung	2 gedung	2 gedung	2 gedung	100,0%			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2 gedung	0	0
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	84 Unit	84 Unit	90 Unit	90 Unit	100,0%			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						106 unit	52 unit	49,06

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang yang membantu Bupati Kabupaten Jombang, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang tahun 2024, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang sudah menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung pada masyarakat dalam hal ini investor. Fungsi yang diselenggarakan pada ruang lingkup fasilitasi

*Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

baik pada investor maupun pelaku UMKM di Kabupaten Jombang dan sebagai front office pelayanan investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Jombang.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG**

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	8	8	8	2.000	2.353,64	506,04 Sd. TB II 2023	1.900	2.000	<i>Nilai realisasi s.d tb II tahun 2023</i>
1	Nilai Investasi Tahun n (dalam Milyar Rupiah)			1.800	1.400	1.900	2.000	2.353,64	506,04 Sd. TB II 2023	1.900	2.000	<i>Nilai realisasi s.d tb II tahun 2023</i>
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang layanan Perizinan dan PM			87,75	89,85	85	86	85,11	Perhitungan Final pada TB IV	85	86	<i>Dikarenakan realisasi pada tahun 2022 tercapai sebesar 85,11 maka target di tahun 2024 ditargetkan sebesar 85</i>
3	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan			4,10	4,15	4,1	4,2	4,61	Perhitungan Final pada TB IV	4,1	4,2	<i>Target berdasarkan Renstra 2024-2026 ditetapkan sebesar 4,1 sebelum nilai rilis tahun 2022, sehingga nilai lebih kecil dari capaian tahun sebelumnya, maka kedepannya akan dilakukan evaluasi perubahan target di tahun 2024.</i>
	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik			N/A	N/A	71	73	N/A	N/A	71	73	
4	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			81	81	80,5	81	80,39	Perhitungan Final pada TB IV	80,5	81	<i>Berdasarkan Renstra 2024-2026 ditetapkan target sebesar 80,50 sebelum nilai rilis tahun 2022, Karena capaian di tahun 2022 tercapai sebesar 80,39 maka target di tahun 2024 akan dilakukan evaluasi perubahan target</i>

**2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tersebut selaras dengan Sasaran RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yang pertama, yakni *“Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”*, serta Sasaran RPD yang keempat *“Meningkatnya PDRB sektor Unggulan dan Investasi Daerah”*. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu tahunan, sampai tiga tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Selain tujuan, dirumuskan Sasaran Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan

indikator : - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Indeks Pelayanan Publik (IPP)

- Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

**2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan

indikator : - Nilai Evaluasi AKIP PD

**3. Meningkatkan Realisasi Investasi**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan

indikator : - Nilai Realisasi Investasi

*Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Dalam mendukung penyelenggaraan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang mempunyai peran strategis dalam hal sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi panduan, standar pelayanan dan SOP Perizinan sebagai upaya untuk membangun persamaan persepsi;
- b. Membangun komitmen dan pelayanan menjadikan bahwa birokrasi perizinan belum berjalan secara efisien dan efektif, sehingga masih ditemukan berbagai masalah dalam pelayanan. Masalah-masalah ini memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dalam terhadap pelayanan publik dan demi letak khususnya investasi daerah beberapa masalah perizinan termasuk di bidang Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan yang sering ditemui diantaranya adalah :
  - Waktu Pelayanan Perizinan Relatif Lama;
  - Biaya yang relatif tinggi;
  - Tidak transparan dan terjadinya pungutan liar;
  - Tidak ada kepastian hukum

Penentuan Isu-isu Strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang antara lain :

1. Implementasi UU Cipta Kerja akan membawa perubahan mekanisme izin
2. Belum berakhirnya Pandemi Covid-19 yang berimbas menurunnya jumlah perizinan dan menurunnya nilai realisasi investasi
3. Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP)
4. Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan dan ketentuan penanaman modal
5. Jaminan Kenyamanan dalam berinvestasi
6. Kurang antusiasnya investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Jombang
7. Pengembangan Aplikasi pelayanan Perizinan Non berusaha (Si Rindunona) berbasis web;

Secara umum pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2021 berjalan dengan baik dan lancar, dengan tetap memperhatikan munculnya permasalahan-permasalahan yang senantiasa diupayakan penyelesaian yang sebaik-baiknya, baik terkait pelaksanaan teknis

*Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

pelayanan kepada masyarakat maupun secara teknis koordinatif dengan instansi teknis terkait perizinan.

Identifikasi permasalahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tugas, pokok dan fungsi meliputi :

1. Masalah jaminan kenyamanan dalam berinvestasi, hambatan ini lebih disebabkan oleh karena tidak terlaksananya secara maksimal SOP dalam proses pelayanan penanaman modal dan sumber daya untuk pelayanan penanaman modal yang kurang memadai baik berupa sarana/prasarana dan SDM penanaman modal.
2. Masih rendahnya tingkat inovasi dan capaian keberhasilan pelayanan penanaman modal yang meliputi aktivitas promosi investasi, perijinan investasi dan insentif penanaman modal di daerah.
3. Masih kurangnya penanam modal atau investor yang menjalin kemitraan dengan pelaku usaha kecil menengah (UKM), ini disebabkan karena sebagian besar produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UKM masih belum sejalan dengan kebutuhan investor yang ada pada daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan daerah (pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan industri pengolahan) sebagai produk yang berdaya saing nasional maupun internasional.
5. Sistem regulasi yang mengatur tentang kebijakan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang kurang menarik sehingga menyebabkan minat untuk berinvestasi semakin berkurang
6. Pertumbuhan investasi yang telah dicapai belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja.
7. Belum terbentuknya regulasi tentang penyederhanaan perizinan dan non perizinan yang akan menunjang dalam pengembangan investasi.
8. Belum optimalnya pelayanan publik yang dapat menunjang perkembangan iklim usaha di Kabupaten Jombang.
9. Belum optimalnya koordinasi dengan SKPD Teknis sehingga proses perizinan melebihi SOP yang ditetapkan.

Berbagai permasalahan dan langkah-langkah antisipatif sebagaimana penjelasan diatas, kiranya dipandang sebagai upaya penyempurnaan proses pelaksanaan pelayanan perizinan yang selama ini telah berlangsung dengan baik, sekaligus sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan kegiatan di tahun 2023.

*Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap kebijakan – kebijakan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

Seperti halnya iklim investasi di Indonesia, dihadapkan tidak saja pada tantangan untuk menarik investasi baru, tetapi juga tantangan untuk mempertahankan investasi yang sudah ada. Kepindahan sebagian lainnya masih tahap rencana beberapa perusahaan multi-nasional menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia sudah berada pada tahap yang cukup mengkhawatirkan. Kedepan, diperkirakan tantangan tersebut akan kian berat, bukan hanya karena lingkungan eksternal yang semakin ketat, akan tetapi juga karena daya tarik domestik yang masih relatif rendah. Secara eksternal, tantangan dimaksud, antara lain terdapat kecenderungan arus masuk penanaman modal asing (PMA) menurun akibat meningkatnya ketidakpastian global yang mempengaruhi rasa aman dalam kegiatan penanaman modal, kemungkinan terjadinya berbagai spekulasi dalam proses merger dan akuisisi perusahaan, serta masalah-masalah kelembagaan seperti kelambatan proses privatisasi di beberapa negara.

Keberadaan regulasi pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang saat ini merupakan kebutuhan utama untuk membangun iklim investasi.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang sebagai organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004

*Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran SKPD seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024-2026.

Adapun rancangan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Jombang	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	100%	7.015.462.544	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Jombang	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	100%	7.015.462.544	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	65.336.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	65.336.000	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	23.623.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	23.623.000	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	41.713.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	41.713.000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	5.015.293.294	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	5.015.293.294	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Jombang	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%			Kab. Jombang	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%		
2.18.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	4.821.595.294	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	4.821.595.294	
2.18.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	183.498.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	183.498.000	
2.18.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangann Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.550.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangann Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.550.000	
2.18.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	7.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	7.650.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100 Persen	71.524.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100 Persen	71.524.000	
2.18.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	18.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	18.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Jombang	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 pegawai	53.524.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Jombang	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 orang	53.524.000	
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>560.826.050</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>560.826.050</b>	
2.18.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	8.845.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	8.845.500	
2.18.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	135.440.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	135.440.000	
2.18.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	3.847.100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	3.847.100	
2.18.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	136.955.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	136.955.000	
2.18.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	92.478.450	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	92.478.450	
2.18.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	40.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	40.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	142.860.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	142.860.000	
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>101.786.900</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>101.786.900</b>	
2.18.01.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	31 Unit	101.786.900	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	31 Unit	101.786.900	
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>592.665.300</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>592.665.300</b>	
2.18.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.800.000	
2.18.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	186.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	186.000.000	
2.18.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	404.865.300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	404.865.300	
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>608.031.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>608.031.000</b>	

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	79.360.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	79.360.000	
2.18.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	123.825.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	123.825.000	
2.18.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	304.106.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	304.106.000	
2.18.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90 unit	100.740.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90 unit	100.740.000	
2.18.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Jombang	<b>PRESENTASE DOKUMEN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DIMANFAATKAN</b>	<b>100%</b>	<b>277.392.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Jombang	<b>PRESENTASE DOKUMEN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DIMANFAATKAN</b>	<b>100%</b>	<b>277.392.000</b>	
2.18.02.2.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kab. Jombang	<b>Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>277.392.000</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kab. Jombang	<b>Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>277.392.000</b>	
2.18.02.2.02.004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	277.392.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	277.392.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Jombang	<b>PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	100%	1.219.850.400	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Jombang	<b>PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	100%	1.219.850.400	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal	35 Kali	1.219.850.400	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal	35 Kali	1.219.850.400	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.219.850.400	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.219.850.400	
2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Jombang	<b>PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP</b>	82 Persen	320.414.150	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Jombang	<b>PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP</b>	82 Persen	320.414.150	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Presentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan	90 Persen	285.949.150	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Presentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan	90 Persen	285.949.150	
		Kab. Jombang	Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan	100%	34.465.000		Kab. Jombang	Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan	100%	34.465.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.04.2.01.00.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.000 pelaku usaha	249.912.150	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.000 pelaku usaha	249.912.150	
2.18.04.2.01.00.07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	24 orang	34.465.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	24 orang	34.465.000	
2.18.04.2.01.00.08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Jombang	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risik Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.000 kegiatan usaha	36.037.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Jombang	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risik Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.000 kegiatan usaha	36.037.000	
2.18.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Jombang	<b>PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>80%</b>	<b>148.769.940</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Jombang	<b>PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>80%</b>	<b>148.769.940</b>	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	90 Perusahaan	148.769.940	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	90 Perusahaan	148.769.940	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.05.2.01.00.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	90 Pelaku usaha	114.395.440	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	90 Pelaku usaha	114.395.440	
2.18.05.2.01.00.06	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Jombang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	95 Kegiatan Usaha	34.374.500	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Jombang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	95 Kegiatan Usaha	34.374.500	
2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Jombang	<b>PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN</b>	23%	372.690.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Jombang	<b>PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN</b>	23%	372.690.000	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan	4.000 pengguna	372.690.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan	4.000 pengguna	372.690.000	

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.06.2.01.00.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaj dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	372.690.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaj dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	372.690.000	
<b>TOTAL</b>					<b>9.354.579.034</b>	<b>TOTAL</b>					<b>9.354.579.034</b>

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024 tidak ada usulan dari masyarakat langsung, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, informasi dari Propinsi, karena usulan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

TABEL 2.4

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024  
KABUPATEN JOMBANG**

**Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang**

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR</b>	<b>100%</b>	<b>7.015.462.544</b>	
<b>2.18.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</b>	<b>100%</b>	<b>65.336.000</b>	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.623.000	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	41.713.000	
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</b>	<b>100%</b>	<b>5.015.293.294</b>	
		<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</b>	<b>100%</b>		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	4.821.595.294	
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	183.498.000	

## Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangann Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.550.000	
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	7.650.000	
<b>2.18.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD</b>	<b>100 Persen</b>	<b>71.524.000</b>	
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	18.000.000	
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Jombang	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 orang	53.524.000	
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>560.826.050</b>	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	8.845.500	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	135.440.000	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Jombang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	3.847.100	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	136.955.000	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Jombang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	92.478.450	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	40.400.000	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	142.860.000	
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>101.786.900</b>	
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana da Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah unit Sarana da Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	31 Unit	101.786.900	
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>592.665.300</b>	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.800.000	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	186.000.000	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	404.865.300	
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>608.031.000</b>	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	79.360.000	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Jombang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	123.825.000	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	304.106.000	
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Jombang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90 unit	100.740.000	
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>PRESENTASE DOKUMEN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DIMANFAATKAN</b>	<b>100%</b>	<b>277.392.000</b>	
<b>2.18.02.2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>277.392.000</b>	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	277.392.000	
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>100%</b>	<b>1.219.850.400</b>	
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Jumlah tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal</b>	<b>35 Kali</b>	<b>1.219.850.400</b>	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.219.850.400	
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP</b>	<b>82 Persen</b>	<b>320.414.150</b>	
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Presentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan</b>	<b>90 Persen</b>	<b>285.949.150</b>	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Kab. Jombang</b>	<b>Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>34.465.000</b>	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.000 pelaku usaha	249.912.150	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	24 orang	34.465.000	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Jombang	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risik Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.000 kegiatan usaha	36.037.000	
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>80%</b>	<b>148.769.940</b>	
<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal</b>	<b>95 Perusahaan</b>	<b>148.769.940</b>	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30 Pelaku usaha	114.395.440	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Jombang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	95 Kegiatan Usaha	34.374.500	

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Jombang	<b>PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN</b>	23%	372.690.000	
2.18.06.2.01	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Jombang	<b>Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan</b>	4.000 pengguna	372.690.000	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaj dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	372.690.000	
<b>TOTAL</b>					<b>9.354.579.034</b>	

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

# Bab 3

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi RPJMN Tahun 2005-2025 yaitu ***“Mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”***. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila  
Dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangk-an modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing  
Dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mereformasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum  
Dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengemb-angan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum,

- meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu  
Dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
  5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan  
Dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
  6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari  
Dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.
  7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

Dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang

Berdasarkan visi dan misi serta agenda pembangunan nasional tersebut pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk mewujudkan tercapainya Indonesia maju, mandiri dan adil. Hal tersebut juga dapat didukung melalui strategi dan kebijakan kunci yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat, yaitu *Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI)* dan *Masterplan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan indonesia (MP3KI)*. Program MP3EI akan menjadi payung semua kegiatan infrastruktur di wilayah indonesia dengan pengembangan koridor - koridor utama yang menjadi pendorong dan penopang kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya serta didukung dengan perbaikan konektivitas antar daerah, diharapkan mampu mewujudkan integrasi pasar hingga ke pelosok desa. Dengan strategi tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan akan lebih baik dan merata sejalan dengan program MP3KI yang diarahkan dalam bentuk akselerasi program - program kerja pengentasan kemiskinan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

*Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dengan mengacu dan berpedoman pada tema RKP serta 11 prioritas nasional dan 3 bidang lainnya, maka pembangunan nasional lebih ditekankan pada penanganan beberapa isu strategi, yaitu :

1. Implementasi UU Cipta Kerja akan membawa perubahan mekanisme izin
2. Belum berakhirnya Pandemi Covid-19 yang berimbas menurunnya jumlah perizinan
3. Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP)
4. Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan dan ketentuan penanaman modal
5. Jaminan Kenyamanan dalam berinvestasi
6. kurang antusiasnya investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Jombang
7. Pengembangan Aplikasi pelayanan Perizinan Non berusaha (Si Rindunona) berbasis web;

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan di

*Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, persyaratan dan biaya. Kendala yang dihadapi daerah yang belum membentuk :

- a. Persepsi dan komitmen kepala daerah dengan para stakeholder belum mantap,
- b. Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang PTSP,
- c. Mindset birokrasi masih belum reformis,
- d. Tidak adanya inisiator daerah dan dukungan pimpinan daerah.
- e. Filosofi reformasi perizinan
  - Penyelenggaraan PTSP berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, disyaratkan ada prasarana loket, tempat proses, tempat pembayaran, penyerahan dokumen, ruang pengaduan dan sekretariat,
  - Penyederhanaan proses, penyingkatan waktu dan kepastian biaya,
  - Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), utamakan Profesional/Kompetensi dan Performance,
  - Keterbukaan informasi dan pemanfaatan TI,
  - Pengaduan dan kepuasan pelanggan,
  - Pembinaan/pengawasan monitoring dan evaluasi,

Pembentukan PTSP diatur berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah, Dasar ketetapan :

1. Diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah,
2. Dيامanatkan bahwa organisasi dan tatakerja unit pelayanan perizinan terpadu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri,
3. Dengan mendapat pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Pembentukan.

Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

**Tema Pembangunan RPJPD**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sasaran Pokok – V : 2024-2025 antara lain :

*“Mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai sentra agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025”*

Arah Kebijakan Tahun 2024 pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yaitu :

*“Meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan yang mendorong industri agribisnis dan pembangunan wilayah”*

**Tema RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024**

*“Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul”*

Prioritas Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2024

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Keamanan dan Ketentraman Umum
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang berkarakter berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan ekstrem
3. Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah sebagai berikut:

**a. Tujuan**

Tujuan yang diprogramkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang pada hakekatnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai/dihasilkan.

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tersebut selaras dengan Sasaran RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yang pertama, yakni

- Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

Indikator : Indeks Reformasi Kabupaten

Target : 70,50

**- Meningkatkan nilai Realisasi Investasi Daerah****Indikator : Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi****Target : 5%****b. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sebagai penjabaran dari tujuan maka sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Selain tujuan, dirumuskan Sasaran Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target : 85

- ✓ Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Target : 4,1

- ✓ Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Target : 71

**2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- ✓ Nilai Evaluasi AKIP PD

Target : 80,50

**3. Meningkatnya Realisasi Investasi**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- ✓ Nilai Realisasi Investasi

Target : 1,9 Trilyun Rupiah

**3.3 Program dan Kegiatan****a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024, program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan**

- Program Program Pelayanan Penanaman Modal

**Kegiatan :**

- ✓ Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

**Kegiatan:**

- ✓ Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**2. Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi**

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

**Kegiatan:**

- ✓ Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota

- Program Promosi Penanaman Modal

**Kegiatan:**

- ✓ Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

**Kegiatan:**

- ✓ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

**3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

**Kegiatan:**

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**b. Rekapitulasi Program Dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Terdapat 6 (enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2024 yang total kebutuhan anggaran sebesar Rp 9.354.579.034 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah*) yang sumber pendanaan berasal dari APBD TA 2024, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

**1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan****▪ Program Program Pelayanan Penanaman Modal**

Indikator Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP dengan target kinerja 87% dan pagu indikatif sebesar Rp. 320.414.150,

Kegiatan :

- ✓ Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

**▪ Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan dengan target 23% dan pagu indikatif sebesar Rp. 372.690.000,-

Kegiatan:

- ✓ Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

**2. Meningkatnya Realisasi Investasi****▪ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Indikator Presentase Dokumen Potensi Dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan dengan target 100% dan pagu indikatif sebesar Rp. 277.392.000,-

Kegiatan:

- ✓ Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota

Sub kegiatan:

- Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

**▪ Program Promosi Penanaman Modal**

Indikator Persentase Tindak Lanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dengan target 100% dan pagu indikatif sebesar Rp. 1.219.850.000,-

Kegiatan:

- ✓ Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

**▪ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal dengan target 80% dan pagu indikatif sebesar Rp. 148.769.940,-

Kegiatan:

- ✓ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- Pengawasan Penanaman Modal

**3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah****▪ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**

Indikator Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur dengan target 100% dan pagu indikatif sebesar Rp. 7.015.462.544,-

Kegiatan:

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**Kegiatan:**

- ✓ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan:**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD,
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

**Kegiatan:**

- ✓ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan:**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**Kegiatan:**

- ✓ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan:**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Kegiatan:**

- ✓ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sub Kegiatan:**

- ✓ **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

**Kegiatan:**

**✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah****Sub Kegiatan:**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**Kegiatan:****✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah****Sub Kegiatan:**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Berikut Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan SubKegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Jombang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR</b>	Kab. Jombang	100%	7.015.462.544	APBD		100%	8.221.767.220
2.18.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</b>	Kab. Jombang	100%	65.336.000	APBD		100%	85.900.000
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	3 Dokumen	23.623.000	APBD		3 Dokumen	33.800.000
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	15 Laporan	41.713.000	APBD		15 Laporan	52.100.000
2.18.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</b>	Kab. Jombang	100%	5.015.293.294	APBD		100%	5.763.337.220

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	50 orang	4.821.595.294	APBD		50 orang	5.540.687.220
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	12 Dokumen	183.498.000	APBD		12 Dokumen	207.650.000
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	1 Laporan	2.550.000	APBD		1 Laporan	3.000.000
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Jombang	17 Laporan	7.650.000	APBD		17 Laporan	12.000.000
<b>2.18.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>100 Persen</b>	<b>71.524.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 Persen</b>	<b>65.000.000</b>
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Jombang	30 Paket	18.000.000	APBD		30 Paket	15.000.000
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Jombang	45 pegawai	53.524.000	APBD		40 pegawai	50.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>100%</b>	<b>560.826.050</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>664.730.000</b>
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	14 Paket	8.845.500	APBD		14 Paket	8.850.000
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	80 Paket	135.440.000	APBD		80 Paket	136.430.000
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Jombang	6 Paket	3.847.100	APBD		6 Paket	3.850.000
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	3 Paket	136.955.000	APBD		3 Paket	235.000.000
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Jombang	2 Paket	92.478.450	APBD		2 Paket	107.700.000
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Jombang	3 Dokumen	40.400.000	APBD		3 Dokumen	30.900.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	40 Laporan	42.860.000	APBD		40 Laporan	142.000.000
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>100%</b>	<b>101.786.900</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>490.780.000</b>

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Jombang	31 Unit	101.786.900	APBD		61 Unit	490.780.000
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>100%</b>	<b>592.665.300</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>751.400.000</b>
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang	12 Laporan	1.800.000	APBD		12 Laporan	2.000.000
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Jombang	12 Laporan	186.000.000	APBD		12 Laporan	313.400.000
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	9 Laporan	404.865.300	APBD		9 Laporan	436.000.000
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>100%</b>	<b>608.031.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>400.620.000</b>
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Jombang	1 unit	79.360.000	APBD		1 unit	45.250.000
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Jombang	24 unit	123.825.000	APBD		24 unit	122.570.000

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Jombang	2 unit	304.106.000	APBD		2 unit	126.500.000
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Jombang	90 unit	100.740.000	APBD		90 unit	106.300.000
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>PRESENTASE DOKUMEN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DIMANFAATKAN</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>100%</b>	<b>277.392.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>
<b>2.18.02.2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>277.392.000</b>	<b>APBD</b>		<b>2 Dokumen</b>	<b>250.000.000</b>
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	2 Dokumen	277.392.000	APBD		2 Dokumen	250.000.000
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>100%</b>	<b>1.219.850.400</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>1.860.000.000</b>
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>35 Kali</b>	<b>1.219.850.400</b>	<b>APBD</b>		<b>35 Kali</b>	<b>1.860.000.000</b>
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	6 Dokumen	1.219.850.400	APBD		6 Dokumen	1.860.000.000

*Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP</b>	Kab. Jombang	82 Persen	320.414.150	APBD		85 Persen	333.250.000
2.18.04.2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Presentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan</b>	Kab. Jombang	90 Persen	285.949.150	APBD		92 Persen	310.900.000
		<b>Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan</b>	Kab. Jombang	100%	34.465.000	APBD		100%	22.350.000
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	6.000 pelaku usaha	249.912.150	APBD		8.000 pelaku usaha	280.800.000
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	24 orang	34.465.000	APBD		16 orang	22.350.000

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Jombang	2.000 kegiatan usaha	36.037.000	APBD		2.500 kegiatan usaha	30.100.000
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>80%</b>	<b>148.769.940</b>	<b>APBD</b>		<b>85%</b>	<b>94.675.000</b>
<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>90 Perusahaan</b>	<b>148.769.940</b>	<b>APBD</b>		<b>95 Perusahaan</b>	<b>94.675.000</b>
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Jombang	90 Pelaku usaha	114.395.440	APBD		30 Pelaku usaha	64.620.000
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Jombang	95 Kegiatan Usaha	34.374.500	APBD		95 Kegiatan Usaha	30.055.000



No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN</b>	Kab. Jombang	23%	372.690.000	APBD		25%	214.926.000
2.18.06.2.01	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan</b>	Kab. Jombang	4.000 pengguna	372.690.000	APBD		4.500 pengguna	214.926.000
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Jombang	8 Dokumen	372.690.000	APBD		8 Dokumen	214.926.000
<b>TOTAL</b>					<b>9.354.579.034</b>				<b>10.974.618.220</b>

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH**

**Bab  
4**

**4.1 RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Berikut adalah Rencana Kerja Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang :

**Tabel 4.1  
Rencana Kerja Dan Kerangka Pendanaan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jombang Tahun 2024**

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR</b>	Kab. Jombang	100%	7.015.462.544	APBD
2.18.01.2.01	<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</b>	Kab. Jombang	100%	65.336.000	APBD
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	3 Dokumen	23.623.000	APBD
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	15 Laporan	41.713.000	APBD
2.18.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</b>	Kab. Jombang	100%	5.015.293.294	APBD
		<b>Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</b>	Kab. Jombang	100%		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	50 orang	4.821.595.294	APBD

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	12 Dokumen	183.498.000	APBD
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	1 Laporan	2.550.000	APBD
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Jombang	17 Laporan	7.650.000	APBD
<b>2.18.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>100 Persen</b>	<b>71.524.000</b>	<b>APBD</b>
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Jombang	30 Paket	18.000.000	APBD
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Jombang	45 pegawai	53.524.000	APBD
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>100%</b>	<b>560.826.050</b>	<b>APBD</b>
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	14 Paket	8.845.500	APBD
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	80 Paket	135.440.000	APBD
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Jombang	6 Paket	3.847.100	APBD
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	3 Paket	136.955.000	APBD
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Jombang	2 Paket	92.478.450	APBD
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Jombang	3 Dokumen	40.400.000	APBD
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	40 Laporan	142.860.000	APBD

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.18.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>100%</b>	<b>101.786.900</b>	<b>APBD</b>
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana da Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana da Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Jombang	31 Unit	101.786.900	APBD
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>100%</b>	<b>592.665.300</b>	<b>APBD</b>
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Jombang	12 Laporan	1.800.000	APBD
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Jombang	12 Laporan	186.000.000	APBD
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	9 Laporan	404.865.300	APBD
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>100%</b>	<b>608.031.000</b>	<b>APBD</b>
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Jombang	1 unit	79.360.000	APBD
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Jombang	24 unit	123.825.000	APBD
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Jombang	2 unit	304.106.000	APBD
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Jombang	90 unit	100.740.000	APBD
						<b>APBD</b>
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>PRESENTASE DOKUMEN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DIMANFAATKAN</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>100%</b>	<b>277.392.000</b>	<b>APBD</b>
<b>2.18.02.2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>277.392.000</b>	<b>APBD</b>

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	2 Dokumen	277.392.000	APBD
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>100%</b>	<b>1.219.850.400</b>	<b>APBD</b>
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah tindak lanjut penyelenggaraan promosi penanaman modal</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>35 Kali</b>	<b>1.219.850.400</b>	<b>APBD</b>
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	6 Dokumen	1.219.850.400	APBD
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>82 Persen</b>	<b>320.414.150</b>	<b>APBD</b>
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Presentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>90 Persen</b>	<b>285.949.150</b>	<b>APBD</b>
		<b>Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>100%</b>	<b>34.465.000</b>	<b>APBD</b>
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	6.000 pelaku usaha	249.912.150	APBD
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Jombang	24 orang	34.465.000	APBD
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Jombang	2.000 kegiatan usaha	36.037.000	APBD
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kab. Jombang</b>	<b>80%</b>	<b>148.769.940</b>	<b>APBD</b>

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	Kab. Jombang	90 Perusahaan	148.769.940	APBD
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Jombang	90 Pelaku usaha	114.395.440	APBD
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Jombang	95 Kegiatan Usaha	34.374.500	APBD
2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN</b>	Kab. Jombang	23%	372.690.000	APBD
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan	Kab. Jombang	4.000 pengguna	372.690.000	APBD
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Jombang	8 Dokumen	372.690.000	APBD
<b>TOTAL</b>					<b>9.354.579.034</b>	

# Bab 5

## PENUTUP

Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024, akan disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja OPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahun yang bersangkutan, disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Bahwa untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang dan Rencana Strategis Perangkat Dearah Tahun 2024-2026 maka ditetapkan Program dan Kegiatan tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai tujuan dan sasaran.
2. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang yang rencana dilaksanakan pada tahun 2024 dititikberatkan pada peningkatan efektifitas pelayanan perizinan dan Penanaman Modal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang yaitu :
  - a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
  - b. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah
  - c. Meningkatnya Realisasi Investasi
3. Untuk ketersediaan anggaran masih belum mencukupi sesuai dengan rancangan awal dan terjadinya defisit APBD, sehingga untuk program kegiatan di tahun 2024 diprioritaskan pada kegiatan peningkatan pelayanan perizinan.

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Jombang, 12 Juli 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JOMBANG**



**Dra. WOR WINDARI, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19731204 199202 2 001**



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

 Jl. Presiden KH. Abdurahman Wahid No. 151 Jombang

 Telp. 0321. 873333 Fax. 0321. 851733

 [dpmpstp.jombangkab.go.id](http://dpmpstp.jombangkab.go.id)

